

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Tema pembangunan Indonesia khususnya di bidang pembangunan pendidikan dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN III 2015-2019) adalah memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis pada sumberdaya alam (SDA) yang tersedia, sumberdaya manusia (SDM) yang berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Tema pembangunan pendidikan selama rencana pembangunan jangka panjang 2005-2024 terdiri dari empat tema yakni periode 2005-2009 adalah peningkatan kapasitas dan modernisasi pendidikan. Periode 2010-2014 temanya adalah penguatan pelayanan pendidikan, sedangkan tema pembangunan pendidikan saat ini yakni periode 2015-2019 adalah menyiapkan manusia Indonesia untuk memiliki daya saing regional dan tema pembangunan pendidikan pada periode 2020-2024 adalah peningkatan daya saing internasional. (lihat Renstra Dikbud RI 2015-2019).

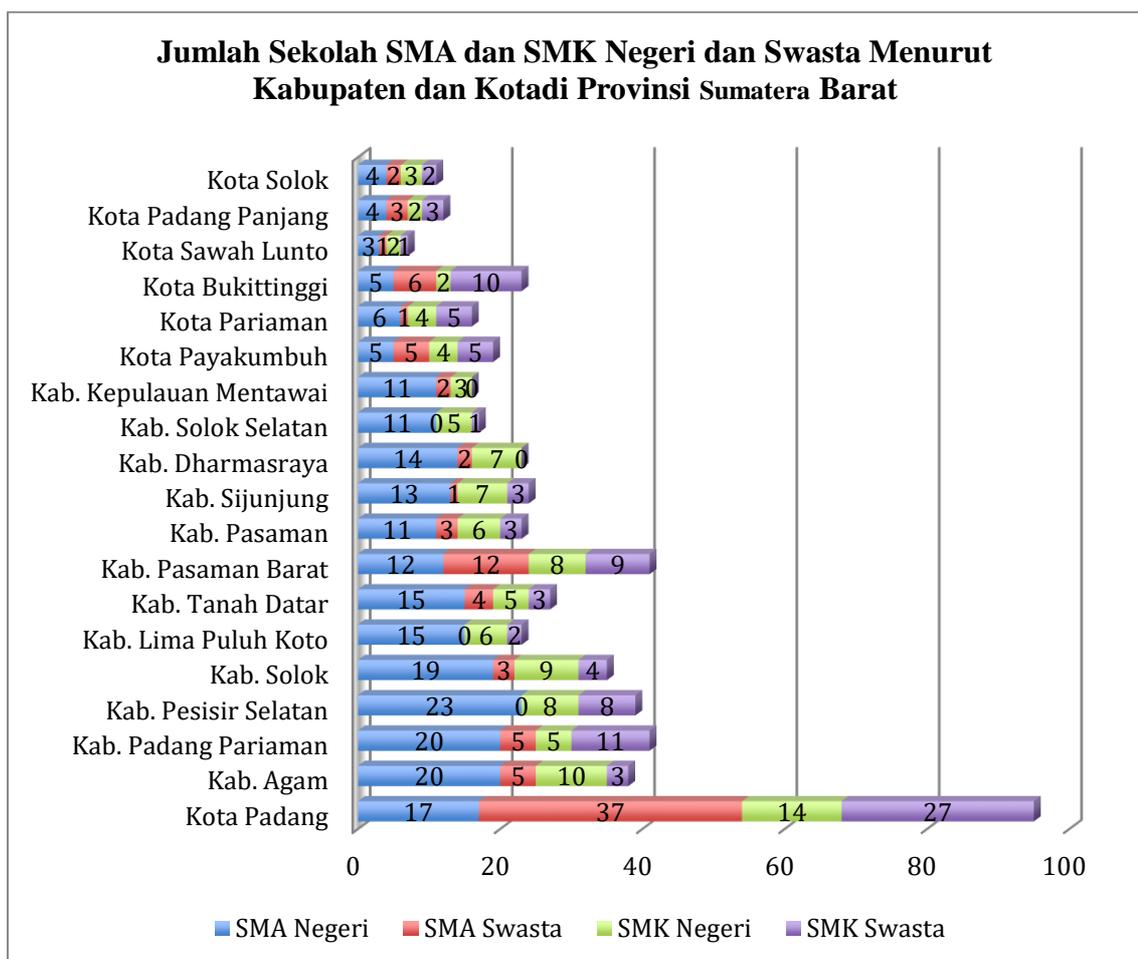
Pelaksanaan rencana strategis pembangunan pendidikan ini diarahkan oleh cara pandang (paradigma) agar sasaran yang dirumuskan dapat dicapai. Diantara paradigma pembangunan pendidikan nasional itu adalah: pendidikan untuk semua, pendidikan sepanjang hayat, pendidikan sebagai suatu gerakan, pendidikan menghasilkan pembelajar, pendidikan membentuk karakter, sekolah yang menyenangkan, pendidikan membangun kebudayaan.

Pendidikan untuk semua dimana pendidikan harus dapat diakses oleh setiap orang dengan tidak dibatasi oleh usia, tempat, dan waktu. Pemerintah harus menjamin keberpihakan kepada peserta didik yang memiliki hambatan fisik, mental, ekonomi, sosial, ataupun geografis. Sedangkan pendidikan sepanjang hayat adalah pendidikan harus diselenggarakan dengan sistem terbuka yang memungkinkan fleksibilitas pilihan dan waktu penyelesaian program secara lintas satuan dan jalur pendidikan. Sedangkan pendidikan sebagai suatu gerakan adalah penyelenggaraan pendidikan harus disikapi sebagai suatu gerakan, yang mengintegrasikan semua potensi negeri dan peran aktif seluruh masyarakat. Pendidikan menghasilkan pembelajar adalah Pendidikan diupayakan menghasilkan insan yang suka belajar dan memiliki kemampuan belajar yang tinggi. Pembelajar hendaknya mampu menyesuaikan diri dan merespons tantangan baru dengan baik.

Berikutnya pendidikan membentuk karakter adalah pendidikan berorientasi pada pembudayaan, pemberdayaan, dan pembentukan kepribadian. Kepribadian

dengan karakter unggul antara lain, bercirikan kejujuran, berakhlak mulia, mandiri, serta cakap dalam menjalani hidup. Selanjutnya sekolah yang menyenangkan adalah sekolah harus menjadi tempat yang menyenangkan bagi manusia yang berinteraksi di dalamnya, baik siswa, guru, tenaga pendidik, maupun orang tua siswa. Semua paradigma pembangunan pendidikan ini tentunya harus menjadi koridor dalam pembangunan pendidikan ke depannya.

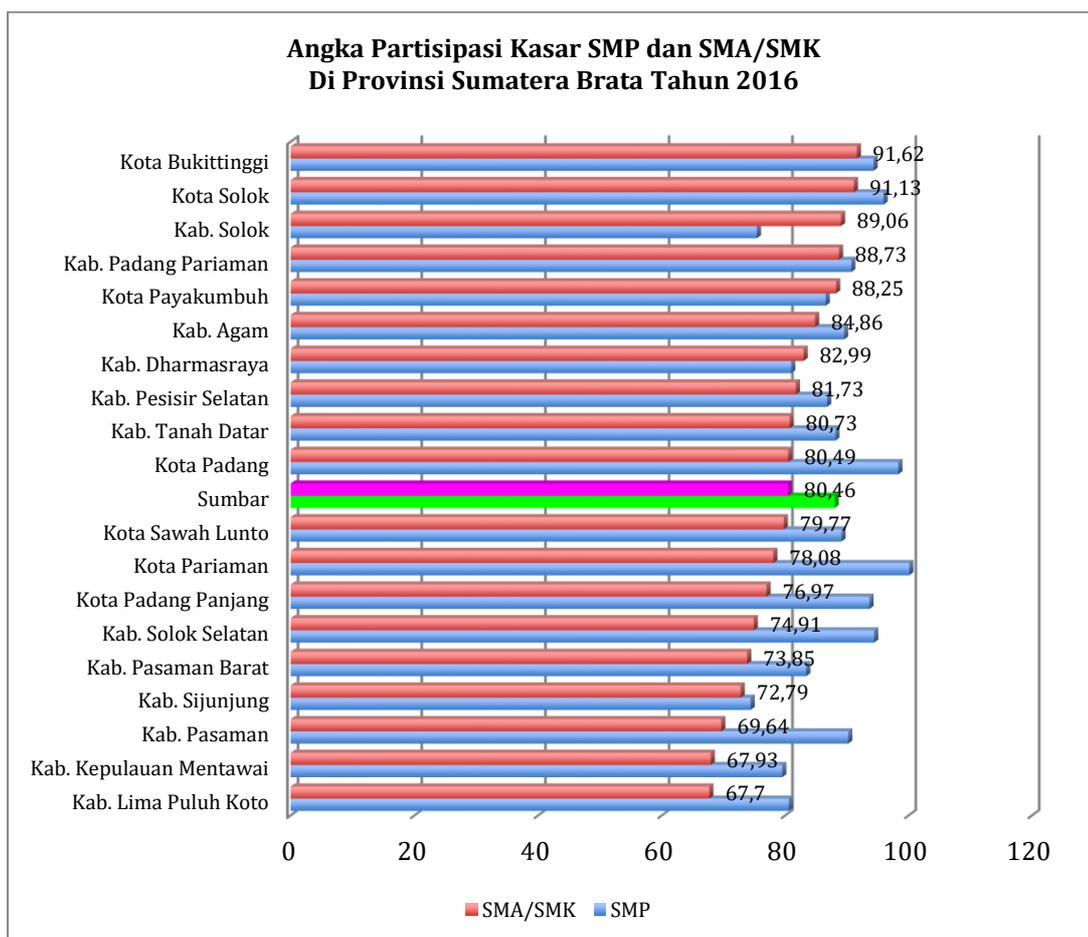
Kemampuan pemerintah provinsi Sumatera Barat dalam mengembangkan aksesibilitas pendidikan menengah atas tentunya tidak terlepas dari potensi jumlah sekolah yang dimiliki baik sekolah menengah atas negeri maupun swasta. Jumlah sekolah menengah atas total adalah sebanyak 530 sekolah yang terdiri dari 320 (60,38%) SMA dan sebanyak 210 (39,62%) SMK. Dari jumlah SMA itu ternyata sebanyak 228 (71,25%) adalah SMA Negeri dan sebanyak 92 (28,75%) adalah SMA swasta. Sehingga dapat dikatakan bahwa kelembagaan pendidikan SMA itu didominasi oleh SMA negeri, peran sekolah swasta pada jenis SMA ini masih relative kecil. Untuk lebih detilnya lihat gambar grafik di bawah ini.



Gambar 1.1. Jumlah Sekolah SMA dan SMK Menurut Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat, Tahun 2017

Jumlah lembaga pendidikan SMK adalah sebanyak 210 unit yang terdiri dari 110 (52,38%) SMK negeri dan sebanyak 100 (47,62%) adalah SMK Swasta, data ini menunjukkan potensi sekolah menengah kejuruan ini cukup berimbang potensinya di provinsi Sumatera Barat. Apabila dilihat dari segi lokasi, maka letak sekolah yang paling banyak itu terdapat di Kota Padang sebanyak 95 (17,92%), disusul oleh kabupaten Padang Pariaman dan Pasaman Barat yang jumlahnya sama yakni sebanyak 41(7,74%). Sedangkan wilayah kabupaten dan kota yang paling sedikit memiliki jumlah sekolah adalah Kota Sawahlunto, Kota Solok dan Kota Padangpanjang.

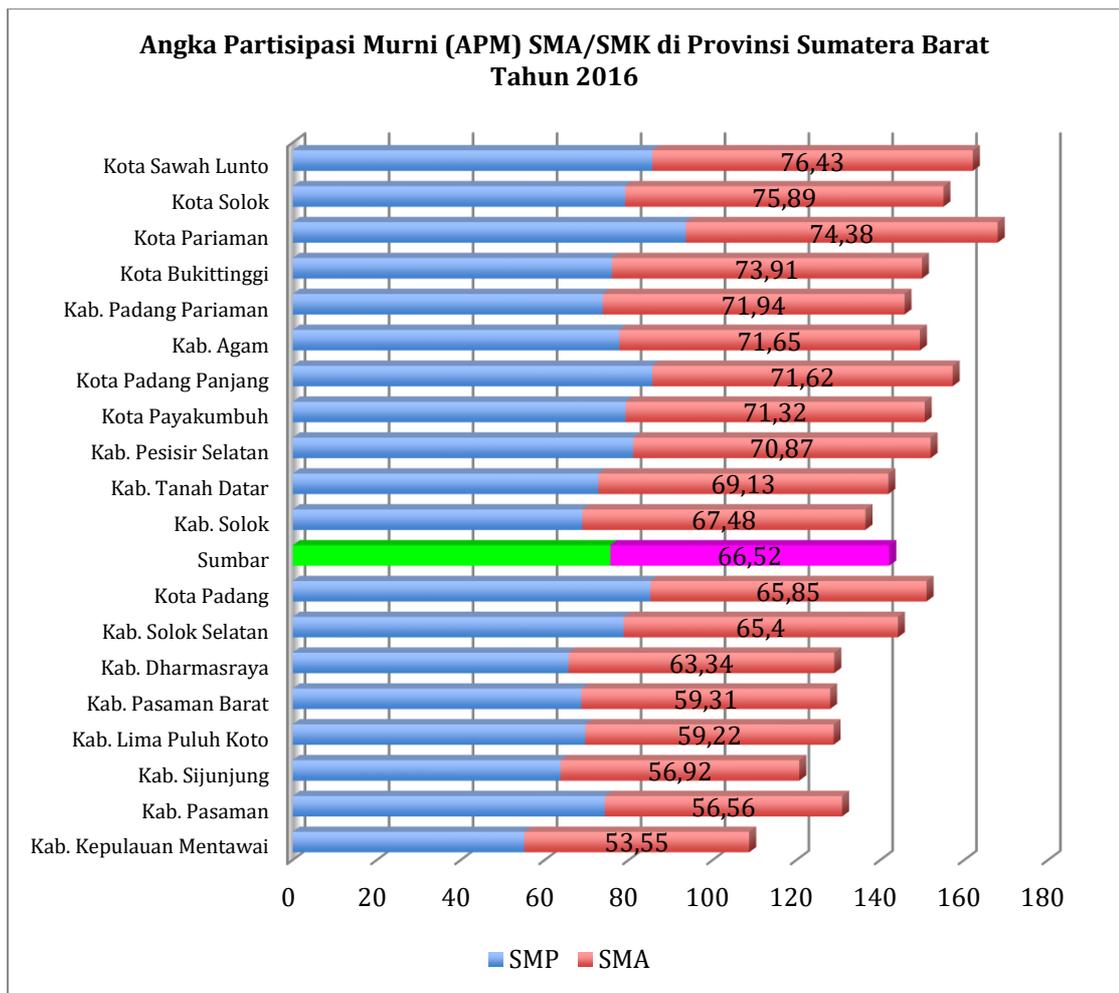
Apabila dikaitkan dengan angka partisipasi kasar (APK) SMA dan SMK ini , maka dua wilayah Kota yakni Kota Sawahlunto dan Kota Padangpanjang ternyata memiliki angka APK berada di bawah rata-rata Sumatera Barat masing-masing secara berturut turut adalah 79.77 dan 76.97 jauh berada di bawah rata-rata APK SMA/SMK provinsi Sumatera Barat yang mencapai 80.46. untuk lebih detilnya lihat gambar di bawah.



Gambar 1.2. Angka Partisipasi Kasar SMP dan SMA/SMK Provinsi Sumatera Barat Menurut Kabupaten dan Kota

Gambar 1.2 di atas juga memperlihatkan bahwa angka APK SMA/SMK yang tertinggi itu diraih oleh Kota Bukittinggi yang mencapai 91.62 dan Kota Solok yang mencapai 91.13. sehingga terdapat empat wilayah Kota yang telah memiliki angka APK yang berada di atas rata-rata Sumatera Barat yakni disamping Kota Bukittinggi, Kota Solok, juga Kota Payakumbuh dan Kota Padang, sedangkan tiga Kota lainnya yakni Kota Sawahlunto, Kota Pariaman dan Kota Padangpanjang berada di bawah rata-rata provinsi Sumatera Barat. Sementara itu, terdapat 6 wilayah kabupaten yang sudah memiliki angka APK SMA/SMK diatas rata-rata provinsi Sumatera Barat yakni Kabupaten Solok, Padang Pariaman, Agam, Dharmasraya, Pesisir Selatan dan Tanah Datar. Sedangkan terdapat 6 kabupaten yang memiliki angka APK SMA/SMK yang berada di bawah rata-rata APK Sumatera Barat yakni kabupaten Solok Selatan, Pasaman Barat, Pasaman, Sijunjung, Mentawai dan 50 Kota.

Angka partisipasi kasar (APK) ini menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah tanpa mempertimbangkan usia sekolah pada jenjang pendidikannya. Jika angka APK mencapai 100, Ukuran APK ini menunjukkan bahwa wilayah tersebut memiliki kemampuan untuk menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya. Berdasarkan konsep APK ini, maka belum ada kabupaten dan Kota mencapai APK SMA/SMK 100. Hal ini berimplikasi bahwa masih ada penduduk usia sekolah SMA/SMK yang belum duduk dibangku pendidikan SMA/SMK dan gejala ini dominan pada tiga kabupaten yakni, Kepulauan Mentawai, Pasaman, dan kabupaten 50 Kota.



Gambar 1.3. Angka Partisipasi Murni (APM) Provinsi Sumatera Barat Menurut Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat Tahun 2016

Gambar 1.3. diatas memperlihatkan angka partisipasi murni (APM) yang menggambarkan persentase penduduk usia SMA/SMK yakni 16-18 tahun yang duduk di bangku sekolah SMA/SMK dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 16-18 tahun yang ada. Belum adanya kabupaten dan kota yang mencapai angka APM 100 berarti ada indikasi bahwa masih ada penduduk yang berusia SMA yakni 16-18 tahun yang belum berada di level pendidikan ini. APM yang tertinggi dicapai oleh Kota Sawahlunto yakni 76.43 dan Kota Solok mencapai 75.89. Artinya sebanyak 76.43 % penduduk usia SMA 16-18 tahun yang berada di sekolah menikmati bangku pendidikan, sisanya sebanyak 23.57% masih belum masuk sekolah SMA/SMK. Hal ini dapat disebabkan oleh karena keterbatasan akses terhadap pendidikan SMA/SMK juga disebabkan karena keterbatasan tempat yang tersedia atau daya tampung yang belum mencukupi, ini tentu perlu dialami lebih lanjut oleh pihak yang berwenang.

## 1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum rencana strategi pembangunan pendidikan provinsi Sumatera Barat tentunya mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun yang setara dengan pengaturan kepentingan pembangunan pendidikan. Dasar hukum pembangunan pendidikan yang diacu tersebut adalah:

1. Pasal 5 ayat (2) undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. UU No: 61 Tahun 1958 tentang pembentukan daerah-daerah swatantra tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau.
3. UU no: 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional
4. UU no: 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional (sisdiknas)
5. UU no: 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah
6. PP no: 19 tahun 2005 tentang standar pendidikan nasional
7. PP no: 48 tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan
8. PP no: 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan
9. PP no: 047 tahun 2008 tentang wajib belajar
10. PP no: 048 tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan
11. PP no: 074 tahun 2008 tentang guru
12. PP no: 23/ tahun 2013 tentang perubahan PP no: 19 tahun 2005 tentang standar pendidikan nasional
13. PP no: 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara dan penyusunan pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah
14. Permendikbud no: 16 tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru
15. Permendikbud No: 69 Tahun 2009 tentang standar biaya operasional dan non operasional SD/MI/SMP/SMA/SMK
16. Permendikbud no: 20 tahun 2016 tentang standar kompetensi lulusan pendidikan dasar dan menengah
17. Permendikbud no: 21 tahun 2016 tentang standar isi pendidikan dasar dan menengah
18. Permendikbud no: 22 tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah
19. Permendikbud no: 23 tahun 2016 tentang standar penilaian pendidikan dasar dan menengah
20. Permendikbud no: 55 tahun 2017 tentang standar pendidikan guru
21. Permendagri no: 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunandaerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerahtentang rencana pembangunan jangka panjang daerah danrencana

pembangunan jangka menengah daerah, serta tatacara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencanakerja pemerintah daerah.

22. Peraturan daerah no: 7 tahun 2008 tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah tahun 2005-2021
23. Peraturan daerah no: 13 tahun 2012 tentang rencana tata ruang wilayah (RTRW) provinsi Sumatera Barat
24. Peraturan daerah no: 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah provinsi Sumatera Barat
25. Peraturan Gubernur no: 78 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas daerah.
26. Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 42 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Penyusunan rencana strategis organisasi perangkat daerah (OPD) pendidikan provinsi Sumatera Barat dimaksudkan agar Dinas Pendidikan provinsi Sumatera Barat memiliki arah pembangunan pendidikan selama 5 tahun ke depan. Tujuan penyusunan Renstra Dinas Pendidikan provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi dan merumuskan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi pencapaian tujuan pembangunan pendidikan di provinsi Sumatera Barat
2. Menentukan arah kebijakan, strategi dan indikasi program dan kegiatan pembangunan pendidikan provinsi Sumatera Barat dalam kurun waktu 2016-2019 sesuai dengan tujuan pembangunan pendidikan Sumatera Barat dalam RPJMD tahun 2016-2019.
3. Menyusun indicator kinerja program dan kegiatan serta pendanaan indikatif pembangunan pendidikan provinsi Sumatera Barat sesuai dengan Renstra kementerian pendidikan dan kebudayaan RI tahun 2015-2019 dan RPJMD provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2019

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penyusunan rencana strategis pembangunan pendidikan provinsi Sumatera Barat dapat dikemukakan sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

Bab 2 Gambaran pelayanan organisasi perangkat daerah Pendidikan provinsi Sumatera Barat berisi tugas fungsi dan struktur organisasi OPD Dinas Pendidikan provinsi Sumatera Barat, sumberdaya OPD Dinas Pendidikan provinsi Sumatera Barat, kinerja pelayanan Dinas Pendidikan provinsi Sumatera Barat, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan SKPD

Bab 3 Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi, berisi identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayann Dinas Pendidikan, telaah visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, telaah renstra K/L, Telaah rencana tata ruang dan kajian lingkungan hidup strategis, penentuan isu-isu strategis.

Bab 4 Tujuan dan sasaran, berisi tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pendidikan provinsi Sumatera Barat,

Bab 5 Strategi dan arah kebijakan pembangunan pendidikan provinsi Sumatera Barat, berisi telaahan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman pembangunan pendidikan provinsi Sumatera Barat

Bab 6 Rencana Program dan kegiatan serta pendanaan, berisi program dan kegiatan serta rencana pagu indikatif pendanaan program dan kegiatan

Bab 7 Penutup, berisi kesimpulan dan implikasi kebijakan